

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2004
- Anwar Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1997
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Basuki Winarmo Nur, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnva Paramita, Jakarta, 1988
- Chalid Pheni, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, Kemitraan*, Jakarta, 2005
- Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, 2012
- Hanafie Rita, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2010
- Handoko, T.Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015
- Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979

- M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Murtir Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Panuh Helmy, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Situmorang Victor, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Sukasmanto, Dina Mariana, *Modul Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, IRE Yogyakarta-CCES, Yogyakarta, 2015
- Suwarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta*, Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Widjaja Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Zainuddin Musyair, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

C. Jurnal

Afdal Prima, Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), *FISIP Univeristas Riau*, Pekanbaru: Volume 1 No.2 Okotober 2014

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab” Jurnal Pro Justisia Edisi IV, *Universitas Parahyangan*, Bandung, 2000

Beni Mulia, Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, *Univeritas Medan Area*, Medan, 2018

Harpen Syofyan, Pengelolaan Pasar Sebagai kekayaan Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014

- Iandrus Jobe, Ronny Gosal, dkk, Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat), *Universitas Sam Ratulangi*, Manado, 2017
- Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation), *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau*, Pekanbaru, 2016
- Muhammad Ridwansyah, Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Volume 13, Nomor 2, *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Gajah Mada*, Juni 2016
- Qiyamul Laili, Analisis Dana Desa Dalam Pemekaran Wilayah Pemekaran Nagari Rabi Jonggor Tahun 2016, *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2016
- Rani Tri Alpina, Pengelolaan Pasar Nagari Sebagai Kekayaan Nagari pada Nagari yang Mengalami Pemekaran (Studi pada Nagari Taluk Kabupaten Pesisir Selatan), *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 2016
- Sapi'I Imam, *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa terhadap Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*, Volume 1 Nomor 1:2-3

D. Dokumen

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, Proyeksi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019, Pertumbuhan Pada Tahun 2019
- Profil Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2019
- Profil Nagari dalam Sejarah Nagari Barung-Barung Balantai , RPJM Nagari Tahun 2019
- Profil Desa dan Kelurahan, Nagari Barung-Barung Balantai, Tahun 2016
- Pemerintahan Nagari Lakitan, Profil Nagari, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Lakitan Tahun 2017-2023
- Profil Nagari Lunang Dua, Sejarah Nagari Lunang Dua, 2019

E. Wawancara

Akpalrizoli, Ketua KAN Lakitan, 18 Agustus 2020, Jam 13.40 Wib, Di Kantor Camat Sutera

Darwis, Pengelola Pasar Lakitan, 18 Agustus 2020 , Jam 10.20 Wib, di Pasar Lakitan

Editawarman, Perangkat Nagari Lakitan, 13 Agustus 2020, Jam 11.30 WIB, di Kantor Wali Nagari Lakitan

Hamidun, Ketua Pengelola Pasar, pada tanggal 21 Agustus 2020, Jam 10.40 Wib, di Rumah kediaman Ketua Pengelola Pasar

Hendro Kurniawan, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 8 Agustus 2020, Jam. 10.50 Wib, di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Hermaldi, Ketua KAN, pada tanggal 21 Agustus 2020, Jam 13.40 Wib, di Kayu Kadang kediaman Ketua KAN

Lukman, Sekretaris Nagari Lunang Dua, Pada Tanggal 14 Agustus 2020, Jam 10.30 Wib, Di Kantor Wali Nagari Lunang Dua

Rizal Mahdi, Bendahara Pengelola Pasar Barung-Barung Balantai, Tanggal 22 Agustus 2020, Jam 16.50 WIB, di tempat kediaman Rizal Mahdi

Weldi, Wali Nagari, pada tanggal 22 Agustus 2020, Jam 16.20 Wib, Dikantor Wali Nagari Barung-Barung Balantai

